

# FOKUS PERHATIAN

## DUA SEMINAR TIGA HARI

Oleh Aswino \*)

### Catatan ringan

JANGAN LAGI pernah ragu bahwa kiprah keilmuan menjelang detik-detik Dies Natalis "Kampus Blok O" (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PITK) selalu mewarnai irama aplikasi sesanti "amal ilmiah" dan "ilmu aamaliah" PTIK, dari tahun ke tahun. Terutama dalam lima tahun terakhir, sejak 1987 saat Majalah BHAYANGKARA mulai nomor 003 terbit dalam kekalaaan yang lebih teratur.

### LEDAKAN PRODUK 1991/1992

Getar keilmuan itu selain semakin terasa juga semakin membara rasa nyaman bagi para partisipan pengunjung PTIK, sejak kampus berikut sarana keolahragaan dan keputastaannya mengalami renovasi karena kurang layak dan ada satu gedung penelitian (PPITK) yang nyaris habis terbakar. "Show of force of Police Science & Technology" dalam wadah 3 (tiga) hari kegiatan pun pernah digelar di kampus itu dalam judul EXPO TEKPOL 1990, yang menyita 4 (empat) lokasi yakni Perpustakaan, Auditorium, tiga ruang besar kuliah umum, dan pelataran termasuk stadion olahraga. Expo Tekpol se-

bagaimana namanya, menampilkan berbagai jenis peralatan-perangkat keras (hardware) yang digunakan oleh semua fungsi di jajaran Polri, termasuk yang sudah-sedang dan akan dipasarkan oleh para pemasok/importir yang bersangkutan. Beberapa diantaranya juga menampilkan perangkat lunak dan demonstrasi yang telah pula mempermanis penampilan duapuluhan stands berbatas pertisi aluminium ala pameran-pameran di PRJ Monas, yang juga dikawal oleh petugas-petugas yang terkesan cukup profesional. Di perpustakaan dan lantai II yang terdiri dari tiga lokal besar tempat kuliah umum, berjajar sejumlah stands toko buku yang juga penerbit. Sebagaimana halnya di perpustakaan "Jokosutono" di samping auditorium, lantai II itupun dibanjiri oleh pengunjung pemerhati yang beberapa di antaranya juga para pembeli/pemesan buku dengan omzet yang lumayan. Dari sejumlah stands yang tampil "flamboyant-komersiil-profesional" ada yang justru tampil begitu sederhana, konsisten seperti pada pameran-pameran buku yang pernah diikutinya. Pojok sederhana itu ternyata tidak sepi pengun-

jung serta pembeli buku-buku kepo-  
lisian asal Bogor. Siapa tidak kenal  
toko buku & penerbit POLITEIA?

Manakala "indoor" shows tadi  
terpadati oleh pengunjung yang  
serba asal dengan penuh antusias-  
me maka (pamor) "outdoor" shows  
dengan penampilan aneka sarana  
mobilitas Satpol Air, Satpol Udara,  
dan Brigade Mobil tidak kalah se-  
maraknya. Sampai-sampai karena  
sarat pengunjung di atas geladak  
kapal patroli, gesekan antena kapal  
yang tergoyang keras bergesek de-  
ngan kabel listrik jalanan PLN  
nyaris menimbulkan kebakaran aki-  
bat korsluiting. Di sisi lain selem-  
bar taman parkir telah disulap men-  
jadi PUJASERA (Pusat Jajan Serba  
Ada) dan "Souvenir Centre" serta  
pameran berikut transaksi/penjual-  
an ekstra produk-produk khusus  
Astra Motor dan lain-lain. Pim-  
pinan dan panitia sendiri tak per-  
nah membayangkan sebelumnya  
bahwa sambutan masyarakat pe-  
ngunjung begitu membludag. Pada-  
hal mereka "mampir" hanya karena  
informasi bisik-bisik dari mulut ke  
mulut; tanpa undangan resmi. Tak  
kurang dari komuniti Litbang dan  
Diklat Angkatan/Polri, sejumlah  
mahasiswa IIP, AHM, IAIN serta  
beberapa Staf Antase Pertahanan  
Kedubes Negara Sahabat telah me-  
ramakan expo tersebut. Suasana  
berbingar ala Pekan Raya tersebut  
makin menjadi intim dan kental  
oleh kehadiran sekitar 510 Pamen  
Peserta Penataran Kapolres s/d Wa-  
kapolda (termasuk para calon peng-

gantinya) seluruh Polda di Indo-  
nesia. Terjadilah arena langka serna-  
cam detik-detik bernostalgia dan  
reuni, sambil sedikit berbangg aka-  
rena kegiatan di Garbha Wiyata  
Luhur Bhayangkara yang baru ter-  
pugar yang sedikit banyak me-  
lahirkan citra dan apresiasi yang  
embrional baru, atas PTIK khu-  
susnya dan Polri pada umumnya.

Sebelum expo tekpol tersebut di  
tutup di hari ketiga, telah dilaku-  
kan semacam "wash-up", diskusi  
evaluatif, serta pemberian piagam  
penghargaan PTIK kepada seluruh  
partisipan pameran. Semua pihak  
tanpa menutupi kekurangannya me-  
rasa puas atas hasil penyelenggara-  
an expo, dan terdapat kesepakatan  
untuk secara berkala menyelengga-  
rakan Expo Tekpol mulai dua  
tahun mendatang. Pengurus Bha-  
yangkari sangat mendukung aspi-  
rasi partisipan tersebut, terutama  
selain dapat membuka stand res-  
torasi tempat reuni juga "income"  
PUJASERA Expo Tekpol 1990  
ternyata lebih besar dibandingkan  
dengan hasil-hasil bazaar yang per-  
nah ada.

Dan ada dalam catatan bahwa di  
seputar show of force tersebut  
tidak kurang dari 4 (empat) produk  
amalan keilmuan terlahir di PTIK.  
Tiga yang pertama adalah produk  
hasil seminar kecil/terbatas yang  
masing-masing diselenggarakan se-  
hari namun selalu dihadiri oleh  
puluhan Pakar dari berbagai dis-  
iplin ilmu dalam tema ANALISIS  
DAMPAK SEKURITI PEMBA-

NGUNAN NASIONAL (ANDAS I, II, dan III). Produk keempat adalah hasil pertemuan pembakuan gagasan untuk melembagakan adanya ASOSIASI PROFESI SEKURITI INDONESIA (APSI) yang menurut dua pemrakarsanya (Mayjen TNI Purn Tjuk Sukotjo dan Mayjen Pol Purn Drs. H. Sutjipno) telah dihadapkan kepada Kapolri yang dicalonkan sebagai Pelindung Apsi.

Penulis tidak rela produk-produk Staf dan Keilmuan "Kampus Blok O" ini lenyap dari pahatan sejarah PTIK, karena siapapun tahu bahwa sistem administrasi kita (termasuk sistem dokumentasi, informasi, dan komunikasi serta publikasi) masih lemah. Oleh sebab itu cukup sering terjadi berkarya tentang masalah yang sudah pernah dihasilkan sebelumnya. Misalnya saja POLA PENGEMBANGAN PTIK, HTCK, STRATIFIKASI KURIKULUM AKPOL-PTIK, TELAHAHAN STAF KEAHLIAN POLRI, KONSEPSI KEAHLIAN POLRI, Penanda tangan beberapa PIAGAM KERJASAMA (beberapa di antaranya berikut pengembangannya) DENGAN PERGURUAN TINGGI LAIN (terakhir dengan UGM pada tanggal 13 Februari 1990 di "Kampus Biru" Yogyakarta) serta DENGAN AJB BUMI PUTERA, dan lain-lain produk yang pernah terlahir. Dan di penghujung tahun anggaran 1991/1992 ini "ledakan" produktivitas tersebut kembali membahana, mendahului produk 2 (dua)

pengkajian dan 2 (dua) penelitian yang laporannya sedang dalam proses penyelesaian (finishing touch). Ledakan produktivitas tersebut terjadi beruntun dalam waktu kurang dari dua bulan, yakni seminar dua hari tanggal 14 dan 15 Januari 1992 serta seminar sehari tanggal 3 Maret 1992.

Yang pertama berjudul SEMINAR (TENTANG) KAJIAN PENJAHAT KAMBUHAN DAN PEMBINAANNYA; yang kedua SEMINAR ASPIRASI DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI DALAM PJPT II.

#### KAJIAN PENJAHAT KAMBUHAN DAN PEMBINAANNYA

Sudah lama terkandung maksud untuk mendalami permasalahan "si biang keladi berulangnya tindak pidana dan semakin berkembangnya keresahan masyarakat" dalam sosok residivist atau penjahat kambuhan. Untuk itu pada tahun 1988 telah dirintis adanya survey, penelitian, dan seminar tentang broccorah tersebut oleh PPITK pimpinan Mayjen Pol. Purn Drs. Djunarso MA, bersama Pok Ahli pimpinan Mayjen Pol (Purn) Drs. Tjoek Soejono S. MPA, Kapolda Jatim, Dirjen Pemasarakatan Dep. Kehakiman RI, dan Dirjen Rehab-sos Dep. Sosial RI.

Belum terjamah penelitian.

Sepaham dengan pernyataan Kapolri bahwa masalah penjahat kambuhan tersebut belum banyak dija-

mah orang serta dunia Perguruan Tinggi maka diskusi-diskusi yang berkembang dari paparan penyajian serta bahasan maupun panduan para moderator telah berlangsung hangat, komunikatif, dan merangsang lahirnya gagasan baru yang segar. Baik dalam penanganan masalah penjahat kambuhan maupun ex-narapidana serta warga binaan; yang ketiga-tiganya mengalami kesulitan yang cukup besar untuk kembali ke dalam lingkungan serta diterima oleh masyarakat tanpa syarat.

Sebelum menyampaikan makalah masing-masing, ke-8 Pakar dalam beragam disiplin ilmu yang tampil ke mimbar seminar telah diacu dengan tampilnya "initial paper" kompilatif produk para Kapolda yang ditunjuk, yang dilemparkan kepada para calon Penyaji Makalah melalui Gubernur PTIK Mayjen Pol Drs. Moch Affandi. Seminar sebagai arena produk ramuan para Praktisionis bersama Teoritikus untuk sementara telah sampai pada kesepakatan bahwa hasil-hasil seminar akan diuji coba dan dikembangkan secara berlanjut, yang bermuara pada diidentifikasinya pola-pola serta tahap-tahap pembinaannya. Baik jangka pendek, sedang, maupun jangka panjang.

Beranjak dari pengertian bahwa "penjahat kambuhan adalah seseorang yang telah dua kali atau lebih diputuskan pidana oleh Hakim untuk kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya" maka

dalam seminar tersebut telah tampil 8 (delapan) Pakar Penyaji Makalah yang dihadapi oleh 4 (empat) Pakar Pembahas Makalah dilengkapi dengan sajian analisisnya yang melengkapi dan atau membantah isi makalah yang ada.

Drs. Soebroto Brotodiredjo, SH yang Rektor Universitas Langlang Buana Bandung membahas makalah-makalah Dokter H. Soesilo Soepeno (Dirjen Bina Rehabsos Dep. Sosial RI) yang berjudul PERANAN DEPSOS DALAM PEMBINAAN EX-NAPI, dan FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PEMBINAAN EX-NAPI/WARGA BINAAN (oleh Prof. Dr. H. Baharoedin Lopa, SH. Dirjen Pemasarakatan Dep. Kehakiman RI).

Boy Mardjono Reksodiputro, SH, MA (FH-UI Jakarta) membahas dua makalah yakni FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG EX-NAPI DALAM MENGULANGI KEJAHATANNYA (oleh Prof. Dr. Sa-tjipto Rahardjo, Undip Semarang) dan PENGARUH "SISTEM PERADILAN PIDANA" TERHADAP PEMBINAAN RESIDIVIS (oleh Prof. Dr. Muladi, SH yang juga dari Undip Semarang).

Brigjen Pol. Drs. Oetoyo Soetopo (Direktur Reserse Polri) membahas dua makalah berjudul TINJAUAN HUKUM DAN NORMA-NORMA TERHADAP PENJAHAT KAMBUIHAN DAN PEMBINAANNYA (oleh Hakim Agung Mahkamah Agung, Bismar Siregar SH) dan

**PENGARUH PEMBINAAN DI DALAM LP PADA NAPI UNTUK BERMASYARAKAT** (oleh Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya). Terakhir, Prof. Dr. Soedjono (Guru Besar Universitas Parahiyangan Bandung) membahas makalah berjudul **TINJAUAN PSIKOLOGI TERHADAP PENJAHAT KAMBUHAN DAN PEMBINAANNYA** (oleh Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Fak. Psikologi UI) dan **PERANAN SEKTOR INFORMAL DALAM PEMASYARAKATAN KEMBALI EX-NAPI** (oleh Dokter Abdul Djalal AR, MPA, MH, Ketua Pusat Penelitian Pembangunan/Pengembangan UI yang purnawirawan Polri). Selesai paparan dan bahasan tersebut seminar dua hari tersebut telah menampilkan empat tahap diskusi yang hangat, lugas namun terbuka serta komunikatif sehingga paduan antara ungkapan penguasaan disiplin keilmuan baik teoritis maupun empirik pragmatis mampu meredakan dinginnya AC auditorium dalam temperatur sekitar 20°C. Keempat moderator yang terdiri dari Drs. H. MB Hutagalung (Brigjen Pol. Direktur Pendidikan Polri), Dra. Purnianti (FH—UI), Drs. Sumarsono, SH (waktu itu masih Kolonel Polisi, masih sebagai Sekretaris Dispen Polri), dan Dr. Harkristuti (Pudek III FH—UI) telah pula sangat berhasil mendinamisir jalannya diskusi, yang diwarnai dengan pengungkapan banyaknya kontradiksi yang ada di lapangan

tugas Polri dengan apa yang seharusnya sebagaimana tersaji dalam seminar, terutama berasal dari para Kapolda, Mahasiswa PTIK, para Dosen, dan tak kalah gencar serta mengenyanya problematik dilematik yang dengan menggebu-gebu dilontarkan oleh seorang tokoh wanita, Ny. Hj. Fatilah Yachya yang Ketua Yayasan "Hidmat" Semarang.

Sidang seminar dalam diskusi tersebut lebih banyak mengetengahkan adanya realitas yang berkisar pada "terlalu ringannya sanksi hukum atas terpidana dua kali atau lebih" serta ketidak siapan pembinaan dari pihak-pihak terkait (Lembaga Pemasarakatan, Polri, Hakim, dan kultur masyarakat calon penampung ex-napi), yang menjadikan para ex-napi semakin "besar kepala dan berdampak lebih meresahkan masyarakat luas".

#### **Identifikasi dan Pola Pembinaan.**

Hasil seminar susunan Team Perumus PTIK baik dalam makalah utuh maupun sinopsisnya telah dihadapkan kepada Kapolri. Letjen Pol. Drs. Kunarto telah mempelajari dengan saksama, yang sesuai dengan inti yang tersirat dalam kata sambutan pembukaannya tanggal 14 Januari maka sejumlah jajaran terkait, termasuk Garbha Wiyata Luhur Bhayangkara (TPIK) telah diminta merealisasikan konsepsi yang ada dalam hasil seminar tersebut, dalam wadah konsep operasionalisasinya.

Identifikasi yang ditemukan adalah sebagai berikut : Pertama, latar belakang sosial-budaya dan motif serta modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh ex-napi/penjahat kambuhan sangat heterogen. Oleh sebab itu diperlukan pola pembinaan yang bervariasi, baik selama di dalam maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Kedua, masyarakat masih berbudaya untuk menolak dan atau menjauhi/mengisolir ex-napi/penjahat kambuhan yang kembali ke masyarakat. Ketiga, tatkala berada di dalam Lapas belum terdapat keseimbangan perlakuan serta pelayanan terhadap ex-napi, baik dari rumpun penegak hukum (original just ice system community) kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman. Selain itu sidang seminar belum sependapat tentang ada tidaknya relevansi antara berat-ringannya sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terpidana dengan kejahatan, dan juga antara kontaminasi kepribadian terpidana dalam Lapas dengan proses prisonisasi. Di pihak lain tidak sependapat bahwa mengingat masih langgengnya budaya panutan maka para tokoh formal dan tokoh informal masyarakat harus diikuti sertakan dalam menentukan pola pembinaan penjahat kambuhan. "Untungnya" eksistensi "white collar crime" belum menyentuh budaya kambuh para ex-napi, yang karenanya pola pembinaan yang disusun perlu menyentuh faktor-faktor kejiwaannya, penga-

ruh dominan sosial-budayanya, serta keterdesakan kondisi sosial-ekonominya. Sidang seminar juga sependapat bahwa sebenarnya tanggung jawab pembinaan atas narapidana oleh Lapas jauh lebih kecil (sekitar 25%) di dibandingkan dengan oleh masyarakat luas (k.l. 75%). Sementara itu periode industrialisasi pembangunan yang masih diwarnai dan mewarnai kesenjangan sosial di bidang kesejahteraan, dapat menjadikan ex-napi sebagai titik bakar yang menimbulkan gejolak dan kecemburuan sosial yang berkembang secara akumulatif.

Kesembilan, terdapat bukti bahwa dalam rangka kampanye "menghilangkan budaya menolak/menjauhi bekas terpidana" maka semua pihak terutama instansi terkait secara intersektoral perlu memberikan informasi kepada khalayak ramai di wilayahnya perihal para ex-napi yang akan kembali ke masyarakat berikut kepribadian serta keterampilan yang dimilikinya. Dengan demikian maka sikap meng "anak tiri" kan ex-napi tersebut cepat ataupun lambat akan terkikis oleh bergesernya sikap/budaya masyarakat menghadapi ex-napi tersebut.

Kondisi yang diharapkan oleh sidang seminar tidak bergeser dari tujuan kita semua yakni terciptanya masyarakat yang tata-tenteram kerta-raharja, yang telah semakin matang/dewasa/siap menerima kembali para ex-narapidana yang telah selesai menjalani hukum-

an. Akan tetapi dengan pendekatan multi-disiplin dan empirik dalam analisis antisipatif para Pakar serta para Praktisionis masih belum mampu melahirkan konsep pembinaan secara multi/inter sektoral. Kesimpulan dan konsep pembinaan multi sektoral yang diketengahkan masih cenderung menunjukkan alternatif-alternatif.

Beberapa pengamat senior dalam seminar dalam "lobbying-lobbying"-nya hampir senada menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh hal yang sangat mendasar yaitu bahwa validitas data baik data statis maupun dinamis yang diketengahkan oleh para Pembuat Initial Paper maupun oleh ke-12 Pakar dalam seminar tersebut belum valid/mutakhir. Bagaimanapun juga validasi tersebut mutlak perlu; kalau tidak maka seminar apapun dan manapun terkesan hanya seperti "ngrumpi ilmiah".

Sidang seminar telah sepakat bahwa untuk menanganinya diperlukan landasan berpikir yang komprehensif integral, dengan jabaran sistem dan pola pembinaan yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, managable, serta bertahap.

Dan untuk menjamin kesinambungan penanganan tersebut diperlukan adanya pola pembinaan yang efektif serta efisien. Itulah sebabnya sidang sependapat dengan gagasan Kapolri yang menginginkan adanya uji coba konsepsi di kewilayahan, dengan menunjuk Polda-Polda seba-

gai pilot project pembinaan tipe "rural", "semi-urban" dan "urban".

### Pilot Project Pola Pembinaan.

Selain kesinambungan yang managable dan bertahap, pola pembinaan penjahat kambuhan tersebut memerlukan adanya lembaga evaluasi atas pelaksanaan operasional yang dilakukan. Untuk itu Polri merasa perlu menentukan wilayah kepolisian untuk uji coba pembinaan, yang mewakili mayoritas masyarakat perkotaan, pedesaan, dan transisional. Dikandung maksud untuk memilih 3 (tiga) Polda proyek dan satu Polda cadangan proyek, masing-masing dipimpin oleh Sub-Project Officer, dengan Direktur Bimmas bertindak selalu Project Officer.

Di tingkat Pusat Direktur Bimmas dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Direktur Intel-pam Polri dan Direktur Reserse Polri, dengan PPITK-PTIK selaku koordinator lembaga-lembaga evaluasi/litbang. Di tingkat Polda, baik secara operasional maupun evaluasi melibatkan fungsi-fungsi terkait sebagaimana tingkat pusat, serta juga Perguruan Tinggi dan Pusdik/Lemdik setempat yang bertindak sebagai lembaga evaluator/litbang; dilengkapi dengan keikutsertaan potensi perorangan dan atau lembaga kemasyarakatan yang ada.

Pemilahan stratifikatif rural, semi-urban, dan urban tersebut di atas diintensifikan dengan penetapan ke-

wilayahan tingkat-tingkat Polsek, Polres, serta Polwil dalam ke-4 Polda yang ditunjuk. Baik untuk jangka pendek, sedang, serta jangka panjang.

#### Dua sisi harapan.

Kesimpulan pertama seminar adalah bahwa di dalamnya diperlukan dua periode pembinaan, dua lingkup pembinaan, empat bidang pelaksanaan pembinaan, dan tiga pentahapan pembinaan. Kedua, diperoleh kesanggupan kerjasama dari Pakar-Pakar Undip guna melanjutkan realisasi langkah-langkah pembinaan dimana Prof. Dr. Muladi SH dan Prof. Dr. Satjipto akan mengkoordinir Pakar-Pakar setempat dengan disiplin ilmunya yang terkait. Ketiga, ada kesediaan yang disampaikan secara lugas dari Peserta seminar yang tokoh wanita dan keagamaan, Ny. Fatilah Yahya, untuk membentuk Yayasan khusus menangani pembinaan penjahat kambuhan, dengan Kapolri selaku Koordinator dan Pelindungnya.

Dari kesimpulan tersebut terdapat dua sisi harapan pengembangan hasil-hasil seminar dua hari tersebut yang terdiri dari :

Pertama, adanya kesiapan pengembangan kajian dan Litbang teoritik hasil-hasil yang telah disimpulkan.

Kedua, adanya kesiapan penerapan hasil seminar di lapangan tugas Polri yang lebih cenderung tidak langsung diselenggarakan di seluruh Polda melainkan melalui uji coba

dengan penunjukkan 3 Polda sebagai pilot project dan 1 Polda cadangan pilot project.

Kiprah keilmuan telah menapak dan menggoyang mimbar keilmiah-an yang amaliah Kampus Blok O. Pertemuan Kepala-Kepala Kepolisian ASEAN (ASEAN OPOL), Seminar antisipatif tentang Kejahatan Komputer/Perbankan, dan lain-lain serta didaya gunakannya konsepsi PTIK—Mabes Polri tentang ANDAS di Bidang Pariwisata yang diawali dengan gelar di Dep. Parpostel, telah semakin memberi warna dinamika kiprah tersebut. Ada data aktual: Semakin sering Pejabat Tinggi Negara datang menempa kehandalan PTIK; terakhir adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berkenan tampil selaku cendekiawan penyampai Pidato Dies Natalis ke-45 PTIK tahun 1991 yang lalu.

#### SEMINAR SEHARI TENTANG ASPIRASI DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI DALAM PJPT II

Sekretaris PTIK, Brigjen Pol. Drs. Oentoro Wirjawan selaku Ketua Panitia seminar dari kiprah ilmiah 3 Maret 1992 yang lalu memperoleh masukan yang berharga sebagai berikut :

Pertama, PTIK telah memperoleh 10 (sepuluh) masukan makalah, 6 (enam) di antaranya tersajikan guna didiskusikan dan ditanggapi secara resmi oleh 3 (tiga) Pembahas Makalah. Aspirasi dan harapan ma-

syarat luas yang hakiki terhadap Polri sebagai aset nasional dalam pembangunan jangka panjang tahap (PJPT) II telah diungkapkan secara rinci, terbuka, realistis, dan bersifat konstruktif, berdasarkan sudut pandang: Politik dan Hankam, Sosial Ekonomi, Hukum dan Perundang-undangan. Kompilasi Pendapat Ilmuwan melalui Potensi Pers, Sosial-Budaya dari sisi Potensi Masyarakat Wanita dan Agama, Sosial-Budaya dari sisi Potensi Masyarakat Pemuda.

Sasaran yang diharapkan adalah pembulatan hasil seminar dalam rumusan wujud masa depan Polri yang dikehendaki oleh masyarakat, bangsa, dan negara dalam jangka waktu 1993–2018 mendatang.

Kedua, hasil-hasil seminar bersumber dari makalah-makalah serta diskusi yang berkembang adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Polri yang ada perlu ditinjau kembali, agar mampu mengantisipasi era globalisasi pembangunan sesuai tugasnya yang secara aspiratif memenuhi harapan masyarakat luas. Untuk itu Polri harus mampu membawakan diri dalam mengembangkan pengayoman masyarakat menghadapi setiap perubahan aspek-aspek kehidupan nasional, yang dilandasi oleh budaya nasionalnya. Dengan demikian kita mampu menghadapi dan menangkal berbagai kejahatan terorganisir (organized crime) dan corporate crime, sebagaimana di-

lakukan oleh Jepang dan Singapura.

2. Untuk memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat secara nasional, Polri perlu mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi yang harus pula didukung oleh peralatan profesi, terutama sarana deteksi, transportasi, telekomunikasi, persenjataan Polri mutakhir, dan dukungan logistik, disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, serta dinamika masyarakat.
3. Peningkatan kualitas personil Polri perlu ditata dan disempurnakan melalui sistem pendidikan dan latihan yang berjenjang-berlanjut yang mampu menunjang kemampuan operasional Polri, yang sekaligus disesuaikan dengan sistem pendidikan ABRI. Hanya dengan demikian dapat diharapkan Polri mampu menanggulangi permasalahan keamanan dan ketertiban yang semakin kompleks.
4. Pembinaan masyarakat dan penegakan hukum secara profesional masih memerlukan penanganan yang ditingkatkan serta konsisten.
5. Dikaitkan dengan kerjasama regional/internasional khususnya antara negara-negara ASEAN, Polri perlu meningkatkan kerjasama yang realistis dan antisipatif guna menangani kejahatan-kejahatan yang berkembang

canggih, baik secara nasional, regional ASEAN, maupun internasional.

6. Diharapkan pula agar Polri mampu mengintensifkan pelaksanaan pembinaan masyarakat yang berakar di Pedesaan, yang lebih menyentuh segala perubahan yang terjadi, dalam menghadapi pembangunan mendatang.
7. Dikaitkan dengan penegakan hukum secara khusus diharapkan agar peranan Polri sebagai penegak hukum lebih ditingkatkan dengan pemantapan eksistensinya sebagai dinamisator dalam pembangunan hukum. Dan untuk itu perlu adanya pemilahan yang jelas antara tugas-tugas penegakan hukum serta tugas-tugas Hankam, dengan pengelolaan yang lebih profesional secara proporsional.

Ketiga, ada sebersit citra yang apresiatif atas tampilnya Polwan yang dinilai cukup aspiratif profesional kepolisian, yang karenanya diharapkan diikuti oleh seluruh jajaran personil Polri. Masyarakat mendambakan Polri yang dicintai dan berpenampilan sesuai aspirasi serta harapan masyarakat yang pada dasarnya akan mendukung upaya terciptanya masyarakat yang tata-tenteram-kerta-raharja.

## **GAIRAH KEILMUAN PJPT II**

Apabila tolok ukur "nilai tambah dan produktivitas" yang juga dica-

ngankan oleh Menteri Ristek Prof. Dr. B.J. Habibie di auditorium PTIK (dalam seminar tentang Kejahatan Perbankan/Komputer) kita jadikan parameter kegagalan dan keberhasilan tugas Polri maka jalan menuju keberhasilan yang aspiratif itu harus melalui lorong-lorong yang teramat panjang dan penuh tantangan.

Tantangan aktual yang faktual masih tetap berada dalam lingkup validasi data administratif. Cukup banyak data historis, produk pengaturan Kamtibmas, produk fungsi-fungsi Polri, produk keilmuan (mulai sarasehan s/d pengkajian, penelitian dan pengembangan) di jajaran Litbang/Sesko-Sespimpol/PTIK, dan beberapa pula terungkap di Seskogab/Lemhannas, berada di tangan pejabat yang kurang profesional serta kurang memiliki gairah kepedulian akan keilmuan. Dan salah satu sumber penyebab, sebagaimana sering diketengahkan oleh empat Kapolri terakhir, adalah belum dimilikinya oleh para Perwira Polri "budaya baca dan budaya menulis".

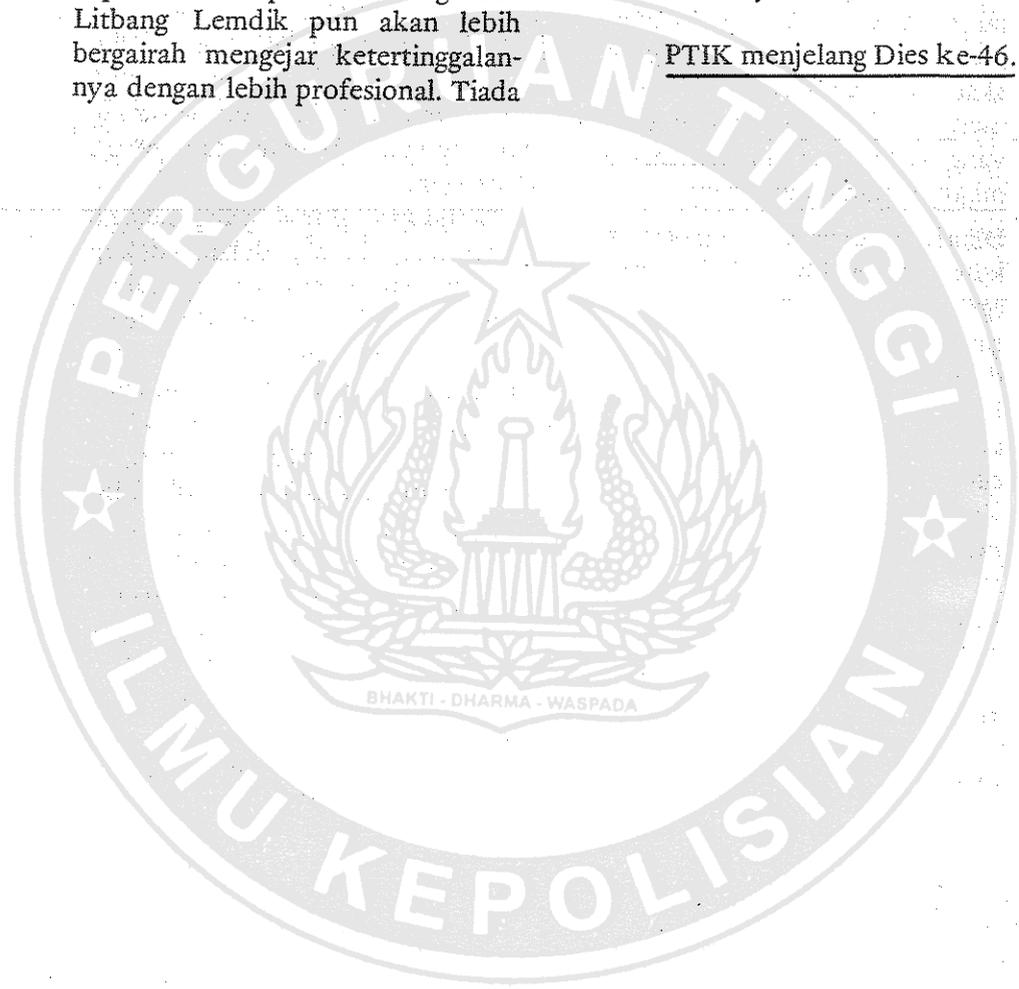
Kiranya tidak berlebihan untuk bersepakat bahwa hanya dengan data yang valid tersebut maka penataan pembinaan dan kiprah operasional secara administratif serta operasional Polri akan berjalan lurus tanpa deviasi yang tidak terukur. Dan agaknya tidak terlalu berlebihan pula apabila ungkapan para Pakar dalam dua seminar terakhir kita garis bawahi : Segala kegiatan

an operasional Polri perlu didukung dengan APBN khusus.

"Dapur-dapur pemikiran profesi kepolisian" seperti Litbang dan Litbang Lemdik pun akan lebih bergairah mengejar ketertinggalannya dengan lebih profesional. Tiada

produk tanpa korbanan beaya, "jer basuki mawa beya". Dan PTIK dengan segala produknya telah membuktikannya!

PTIK menjelang Dies ke-46.



# RUANG PUSTAKA

Siagian, Sondang P.

Teori motivasi dan aplikasinya/Sondang P. Siagian.

— Jakarta: Bina Aksara: 1989.

xvii, 238 hal. : 20 cm.

Bibl. hal. 235—238

Penulis menyusun buku ini berharap masih akan memperoleh tempat yang wajar dalam "dunia" kepustakaan di Indonesia, baik untuk kepentingan pemahaman teoritikal oleh para mahasiswa maupun untuk diterapkan dalam praktek Administrasi dan manajemen di lapangan oleh mereka yang sedang diproyeksikan akan menduduki hirarkhi jabatan manajerial dalam berbagai jenis organisasi, di dalam dan di luar lingkungan pemerintahan. Buku ini penting untuk dibaca karena membahas tentang :

1. Dasar-dasar kerangka acuan konseptual bagi pembahasan teori motivasi dan aplikasinya.
2. Pemahaman teori motivasi dengan pendekatan multidisipliner.
3. Berbagai faktor yang berpengaruh pada jati diri seseorang, mutlak harus dipahami seorang manajer.
4. Beberapa teori motivasi yang diungkapkan oleh Maslow, Gregor, Clayton dll.

Siagian, Sondang P.

Teori dan praktek kepemimpinan/Sondang P. Siagian.

— ed.2— Jakarta: Rinuka Cipta: 1991.

xi.192 hal. : 21 cm.

Bibl. hal. 185—189

Penerbitan buku ini diperuntukkan bagi pembaca yang berminat mendalami kepemimpinan serta dalam usaha memperkaya bahan bacaan tentang kepemimpinan.

— Buku ini terwujud dari hasil pengamatan praktek kepemimpinan dan pengetahuan serta pengamalan sendiri, menjadi dasar kristalisasi pemikiran penulis yang terbagi dalam tujuh bab dengan pokok-pokok bahasan:

1. Dikotomi pandangan tentang asal-usul kepemimpinan; konsistensi gaya kepemimpinan.
2. Tipologi kepemimpinan
3. Fungsi-fungsi kepemimpinan yang hakiki
4. Analisis kepemimpinan berdasarkan ciri-ciri; perilaku; penerimaan.
5. Model kepemimpinan berdasarkan teori situasional.

Indonesia. Mabes Polri

Kasus yang dapat terjadi dalam pengamanan pemilu 1992, — Jakarta: Subdit Pammasbang: 1992.  
22 hal. : 14 cm.

Buku ini membahas kasus-kasus yang dapat terjadi dalam pengamanan pemilu di tahun 1992 yang akan datang.

— Maksud penerbitan buku ini yaitu memberikan tuntunan guna mewaspadaai kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dan garis besar cara bertindak dalam penanggulangannya yang mencakup upaya deteksi dan aksi preventif maupun represif secara rinci dan bergambar. Buku ini menyajikan:

1. Prinsip Penuntun
2. Pencalonan anggota DPRD II/DPRD I/DPR RI
3. Pengumuman Oktober
4. Kampanye dan minggu tenang.

Indonesia. Mabes Polri.

Rumusan hasil seminar sehari tentang apresiasi dan harapan masyarakat terhadap Polri dalam PJPT II/oleh Tim Perumus. — Jakarta: PTIK: 1992.  
108 hal.: 29 cm.

Maksud dari penyusunan naskah ini adalah merumuskan tentang Apresiasi dan harapan masyarakat terhadap Polri dalam pembangunan jangka panjang tahap kedua. Tujuannya diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan pimpinan ABRI/POLRI, dalam rangka pembangunan Polri pada masa yang akan datang. Isinya ialah: hasil-hasil Tim Perumus a.l. :

1. Mayjen TNI Soekarto/Gubernur Lemhanas dengan judul: Peranan Polri yang diharapkan dalam PJPT—II.

2. Ny. Fadlilah Yachya/Wk. Ketua I himpunan Daiyah Muslimat Fatayat NU Pusat dengan judul: Wajah Polri dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Ke- II.
3. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo/Dekan Undip dengan judul Kepolisian RI dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Ke-II.
4. John Ihalauw, SE. PhD dengan judul: Harapan-harapan masyarakat terhadap Polri (pesan-pesan untuk kurun waktu 25 tahun mendatang).
5. Dr. Melly G. Tan/Ahli Peneliti Utama PMB-LIPI dengan judul gangguan Kamtibmas (suatu tinjauan sosiologis).

Indonesia. (Undang-Undang, Peraturan, dsb).

Informasi peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. 9 Th. V Indonesia. . — Jakarta: Proyek SJDI Hukum: 1992.  
xxiii, 98 hal.: 27 cm.

Buku ini menyajikan informasi Peraturan Perundang-undangan Pemerintah DKI Jakarta tahun. 1990 yang disusun secara alfabet. Yang isinya: Undang-Undang Pemerintah DKI dari Agama < tempat ibadah >, Angkutan Umum, Penertiban bangunan liar sampai Instruksi Gubernur DKI. Tujuannya ialah untuk membantu pemakai dan pencari peraturan perundang-undangan, serta menambah khasanah informasi peraturan perundang-undangan Pemda DKI.

Marpaung, Leiden

Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik)/Leiden Marpaung.  
— 1— Jakarta: Sinar Grafika: 1992.  
iii, 224 hal. : 21 cm.

Buku ini disusun untuk memberikan penjelasan suatu istilah maupun sesuatu unsur tindak pidana yang disebut "delik". Para penegak hukum dihadapkan dalam melaksanakan tugasnya menunjang ketertiban maupun perasaan aman setiap penduduk, dapat mengurangi kekeliruan/tidak tepatnya menerapkan unsur-unsur delik.

— Menguraikan serta menjelaskan dengan contoh-contoh tentang pengertian delik dan unsur-unsur delik; sengaja; kealpaan; perbuatan manusia; melawan hukum; sifat dapat dihukum; keadaan-keadaan; deelneming dan bagan unsur-unsur delik. Merupakan perangkat lunak sebagai salah satu acuan dalam pembangunan hukum nasional.

## Indonesia, Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Sejarah Kepolisian Daerah Jawa Tengah tahun 1945—1990.—Semarang: Polda: 1991  
210 hal.: 28 cm.

Sejarah Kepolisian Daerah Jawa Tengah produk Polda Jawa Tengah menyajikan sejarah perjuangan yang dapat menjaebatani generasi sebelumnya dan generasi penerus. Melalui tulisan sejarah seperti ini diharapkan pewarisan nilai-nilai kejuangan kepada generasi penerus dengan tujuan untuk meninggikan moril, menanamkan semangat kesatuan, menanamkan sifat-sifat kepemimpinan, menumbuhkan sifat-sifat kepahlawanan, rela berkorban, cinta kepada tanah airnya dan bangsa dapat dilaksanakan. Buku ini berisi antara lain :

- 1. Kepolisian Jaman penjajahan Belanda
- 2. Kepolisian Jaman penjajahan bangsa Perancis
- 3. Kepolisian Jaman Pemerintahan Inggris
- 4. Kepolisian Jaman Jepang
- 5. Kepolisian Republik Indonesia.

## Tabah, Anton

Menatap dengan mata hati: polisi Indonesia/Anton Tabah : editor Priyo Utomo.—Jakarta: Gramedia: 1992.  
xvii, 413 hal.: 21 cm.

Karya Anton Tabah ini membahas tentang masalah-masalah Kepolisian di Indonesia dengan tujuan untuk memberi gambaran dan tambahan wawasan kepada masyarakat luas tentang kepolisian dan Polri.

- Berisi antara lain:
- 1. Tentang Kepolisian di Indonesia
- 2. Tentang Inovasi
- 3. Analisis kasu-kasu
- 4. Masalah hukum
- 5. Operasi Kepolisian.